

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Fahira Dwi Fifian

NPP.29.1742

Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: fahirafifian@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Covid-19 is a non-natural disaster that attacks all levels of the world's community. In Indonesia, the policy of limiting community activities is known as large-scale social restrictions (PSBB). The government has issued a policy of providing social assistance for people who are greatly affected by the economic aspect due to the Covid-19 pandemic.

Purpose: The purpose of this study is to analyze and describe how the role of the Social Service in helping to cope with the Covid-19 disaster that occurred through BLT, to find out the inhibiting factors and efforts to overcome the obstacles that occur. **Method:** descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In addition, to analyze the data using several steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. **Result:** The results of the study show k but are still not good at the dimension of liability. The contributing factors include: multiple KK and KTP, inadequate facilities, and low public understanding of BLT, Efforts made by the Social Service are to re-collect community data so that it fits the criteria for Covid-19 BLT recipients, make budget proposals, and repair facilities and infrastructure that are not suitable for use, as well as outreach to the public about the importance of a valid identity for Covid-19 BLT recipients. **Conclusion:** The role of the Social Service in dealing with the Covid-19 disaster through direct cash assistance (BLT) in Jayawijaya the Regency can be said to have not been going well. In the implementation of the COVID-19 disaster management, there are obstactos in the provision of BLT and there must be a form of effort as a solution so that the provision of BLT can be effective.

Keywords: Social Service, Covid-19, Direct Cash Assistance (BLT)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Covid-19 menjadi salah satu bencana non alam yang menyerang seluruh lapisan masyarakat dunia. Di Indonesia, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dikenal dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak dari aspek ekonomi akibat pandemi Covid-19. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Sosial dalam membantu menanggulangi bencana Covid-19 yang terjadi melalui BLT, mengetahui faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode:** metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu untuk menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan k tetapi masih kurang baik pada dimensi kewajiban. Faktor penyebabnya antara lain adalah : KK

dan KTP ganda, fasilitas kurang memadai dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BLT, Upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan pendataan ulang masyarakat agar benar-benar sesuai dengan kriteria penerima BLT Covid-19, melakukan pengajuan anggaran dan perbaikan terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang tidak layak pakai, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya identitas yang valid bagi penerima BLT Covid-19. **Kesimpulan:** Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana Covid-19 melalui bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan penanggulangan bencana covid-19 terdapat hambatan dalam pemberian BLT dan harus adanya bentuk upaya sebagai solusi agar pemberian BLT dapat efektif.

Kata kunci: Dinas Sosial, Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghujung akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan bencana berupa mewabahnya suatu virus yang menyerang manusia. Virus tersebut pertama kali ditemukan di China yang akrab dengan sebutan virus corona. Mengawali tahun 2020, virus corona mulai merambah memasuki Indonesia yang ditandai dengan terkonfirmasi dua orang positif dari warga Depok, Jawa Barat. Langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona baru terlihat setelah *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana pandemi global.

Covid-19 menjadi salah satu bencana non alam yang menyerang seluruh lapisan masyarakat dunia. Kemunculannya yang bersifat secara tiba-tiba menjadi perkara sulit untuk dihadapi, bahkan tidak ada satupun negara yang siap termasuk Indonesia. Pembatasan terhadap mobilisasi masyarakat untuk dilaksanakan di rumah masing-masing merupakan langkah berat yang dipilih pemerintah. Di Indonesia, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dikenal dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini mulai diberlakukan pada bulan April 2020 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Istilah-istilah dari kebijakan pemerintah tersebut sering berubah-ubah, mulai dari PSBB hingga PPKM dengan level 1-2-3-4. Meskipun demikian, di setiap kebijakan tersebut masih menganut prinsip yang sama, yakni sebagai upaya untuk mengendalikan atau menanggulangi penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, banyak persoalan yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan PSBB yang sangat berdampak besar terhadap perekonomian nasional yang sempat mengalami kontraksi hingga 5,23%. PSBB yang makin meluas ini bahkan menghentikan roda perekonomian masyarakat dan turut menjadi sebab meningkatnya masyarakat miskin.

Kebijakan pembatasan aktivitas pada masyarakat sebenarnya memang bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan, terutama bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian pada sektor informal. Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak dari aspek ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bantuan tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Penyelenggaraan bantuan sosial ini lebih lanjut diatur pada Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19.

Bantuan ini berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Sifat bantuan sosial ini tidak terus menerus dan dilakukan secara selektif yang memiliki tujuan untuk dapat melindungi masyarakat dari terjadinya suatu risiko bencana non-alam seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, bantuan sosial sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Jayawijaya, terutama masyarakat yang secara ekonomi terdampak oleh kebijakan yang lahir akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera mengambil tindakan dengan memberikan bantuan sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Kesenjangan Permasalahan yang Diambil

Bencana pandemi Covid-19 ini bahkan sudah menyebar hingga seluruh Kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Jayawijaya provinsi Papua menjadi salah satunya. Kabupaten Jayawijaya menduduki posisi ke-6 daerah yang termasuk sebagai salah satu daerah dengan jumlah tertinggi kasus Covid-19 di provinsi Papua. Terbukti dari data yang dirilis Satgas Covid-19 provinsi Papua per 29 Agustus 2021, jumlah kasus positif di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 1.825 setelah dilewati oleh Biak dengan jumlah kasus positif mencapai 2.715 orang.

Dampak perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19 ini bukan hanya menyerang pada skala nasional. Akan tetapi sampai pada tingkat lokal seperti Kabupaten Jayawijaya. Petrus Mahuze yang merupakan kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) Kabupaten Jayawijaya mengatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya diperkirakan mencapai 8,1% pada bulan Juni 2020. Namun, akibat adanya pandemi ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya diperkirakan hanya mencapai angka 2,18%.

Lebih lanjut, bappeda Kabupaten Jayawijaya memprediksikan persentase angka kemiskinan mengalami kenaikan mencapai 40,48% akibat pandemi yang menghambat aktivitas masyarakat di berbagai sektor lapangan. Selain tingkat kemiskinan, pihaknya juga memprediksi akan terjadi lonjakan tingkat pengangguran terbuka mencapai rata-rata 2,57%, yang sebelumnya diprediksi hanya berkisar 0,57% di tahun 2020.

Akan tetapi, bantuan sosial yang niat awalnya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat yang perekonomiannya terhenti akibat Covid-19, justru menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nicolas Itlay mengatakan, sebagian warga tidak dapat mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat karena tidak memiliki tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTPE) dan kartu keluarga (KK). Warga distrik Wouma juga mengeluhkan hal yang sama. Saat berdemonstrasi ke kantor posindo Wamena, mereka menyebutkan penerima sebelumnya mencapai 1.603 jiwa namun berkurang hingga menjadi 285.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perlindungan sosial dan peran dinas sosial dalam program BLT. Penelitian Imam Azhari, Eran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat purnan di desa pungit kecamatan Sekalak Kabupaten Bulungan dengan hasil penelitian Dinas Sosial Kabupaten Bulungan telah melaksanakan program-program yang membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat, seperti dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial, bantuan sosial, program rumah layak huni, pemberdayaan, jaminan pelayanan kesehatan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Muhammad Lukmanul, Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap korban bencana kebakaran di Kota Samarinda dengan hasil penelitian Penyaluran bantuan kepada korban kebakaran dianggap lemah dan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak terkait. Karena penyaluran bantuan ini bermaksud untuk membantu kelangsungan hidup korban bencana namun terhambat oleh keterbatasan dana dan kurangnya sumber daya manusia dari Dinas Sosial.

Baso Iping, Perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemi dengan hasil penelitian Perlindungan sosial menjadi aspek yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam proses pengembangan sosial. Sehingga negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial serta jaminan sosial yang bersifat nasional terutama pada bidang ekonomi pada masa pandemi seperti sekarang. Perlindungan sosial pemerintah salah satunya adalah melalui bantuan yang diberikan pemerintah yaitu bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 terutama kepada masyarakat miskin dan pekerja sektor informal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Cara ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19.

1.4. Pernyataan Kebenaran Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang mengkaji tentang peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada era pandemi. Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan lokasi penelitian dan jenis penyaluran penelitian. Dan persamaan yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Selain pada lokasi penelitian yang berlokasi di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan teori (Seoekanto 2009).

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Sosial dalam membantu menanggulangi bencana Covid-19 yang terjadi melalui BLT, mengetahui faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE

Penelitian menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan tingkah laku yang diamati.

Sumber data yang digunakan yaitu, data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. data primer disebut juga data orisinal ataupun data up to date. Untuk mendapatkan data utama peneliti harus mengumpulkan data secara eksklusif. teknik yg digunakan ialah observasi dan wawancara. Dan data sekunder, dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder bisa di dapatkan dari berbagai sumber seperti data sekunder memiliki banyak sekali sumber, seperti buku, jurnal, artikel dan penelitian sebelumnya, Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan tujuan menentukan suatu sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan secara khusus oleh peneliti.

Instrumen Penelitian melalui pengukur fenomena dan sosial yang akan diteliti oleh peneliti, instrument penelitian di butuhkan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam mengelola sebuah data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan. Serta wawancara, dan observasi adalah *instrument* pendukung seorang peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan data yang akurat yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kabupaten Jayawijaya

Menurut Soekanto (2009) peran merupakan pekerjaan yang dilakukan secara dinamis dan sesuai dengan kedudukannya atau status yang dimiliki dengan aturan sosial, bahkan dari fakta bahwa tindakan keteraturan dapat disesuaikan dengan peran yang berbeda.

3.1.1 Hak Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya

Hak pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Beberapa indikator mencakup ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, jumlah fasilitas, dan jumlah dan kualitas sumber daya manusia/ karyawan.

Menurut konsep peran Soekanto penulis mempunyai pendapat bahwa yang disebut sebagai hak dalam suatu peran adalah komponen yang tidak dapat dengan mudah dilepaskan begitu saja. Begitupun dengan hak yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya selaku instansi yang membantu tugas dari kepala daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapat pengertian hak yaitu, segala sesuatu yang dapat diperoleh setelah selesai melakukan suatu kewajiban.

Adapun beberapa hak yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya adalah :

a. Ketersediaan anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mensejahterakan masyarakat, seperti membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri dan kepentingan umum yang lainnya yang mungkin berkaitan dengan masyarakat. Sesuai dengan visi Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, tentunya Dinas Sosial membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya.

b. Ketersediaan fasilitas

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan sebagai pelayan masyarakat salah satunya yaitu pada bagian jaminan sosial. Untuk menjalankan visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, tentunya membutuhkan alat pendukung seperti kendaraan untuk membantu sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebenarnya kurang memadai dan belum semua tergolong baik dan bisa digunakan. Sebagian besar sarana dan prasarana perlu mendapat perbaikan dan perhatian dari pemerintah.

c. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memiliki total 25 orang pegawai yang saat ini bekerja pada beberapa bidang antara lain pada bidang rehabilitasi sosial, penanggulangan kemiskinan,

perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan advokasi tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, pembinaan kelembagaan sosial penyandang disabilitas, pembinaan kelembagaan sosial, pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan dan komunitas adat terpencil, perencanaan dan evaluasi, bagian umum kepegawaian, pengawasan kelembagaan sosial, rehabilitasi sosial dan tuna susila, keuangan, penelitian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Para pegawai yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik diberikan surat peringatan pertama, apabila dengan keluarnya surat peringatan pertama tersebut para pegawai yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa keterangan apapun maka kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya akan mengambil tindakan lebih keras seperti pengurangan tunjangan dan pemecatan.

3.1.2 Kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah membantu tercapainya tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, antara lain: Menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan pusat dan daerah, memastikan hubungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menurut konsep peran Soekanto, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban merupakan hal yang harus dijalankan oleh individu agar mereka bisa mendapatkan haknya. Berdasarkan pengertian mengenai kewajiban tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perannya. Adapun beberapa kewajiban yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya adalah :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Tupoksi

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sebagai institusi teknis yang menjamin kesejahteraan sosial sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara intensif dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kota dalam bentuk kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Prioritas pelaksanaan bantuan sosial diarahkan kepada mereka yang tidak hidup layak atau yang memiliki masalah sosial. seperti; Cacat Sosial dan Penyimpangan Perilaku; Korban Bencana, Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi termasuk Isolasi. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didukung juga oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

b. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial juga memiliki program-program yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, program-program tersebut antara lain merupakan program yang di berikan oleh pemerintah pusat . Dinas Sosial wajib menjalankan program-

program sosial yang di berikan oleh pemerintah pusat dan kementerian sosial republik Indonesia, program-program yang di berikan adalah program yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang saat ini sedang di jalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya adalah pemberian bantuan bagi korban bencana pandemi Covid-19 yaitu memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai yaitu sejumlah uang untuk masyarakat dan keluarga terdampak Covid-19 .

c. Visi & Misi

Sesuai dengan visi dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya yaitu “terwujudnya kesejahteraan sosial dan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Jayawijaya”. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang terkenal dengan daerah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Jayawijaya, selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan berpendidikan merupakan tujuan pembangunan manusia Jayawijaya baik melalui penyediaan sarana prasarana dan perbaikan pelayanan public dengan demikian akan menumbuh kembangkan sektor swasta dan perekonomian daerah.

3.2 Faktor Penghambat Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kabupaten Jayawijaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau program pasti muncul faktor penghambat di dalamnya, begitu pula dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya . Berikut beberapa faktor penghambat dari pemberian bantuan langsung tunai di Kabupaten Jayawijaya .

3.2.1 Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Ganda

Semenjak bencana pandemi Covid-19 ini masyarakat tidak lagi dapat berjualan di pasar seperti biasanya akibat PSBB yang diberikan oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya . Sehingga bantuan langsung tunai berupa uang ini sangat di harapkan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi untuk mencairkan uang tersebut, di butuhkan persyaratan kartu keluarga dan KTP bagi calon penerima bantuan langsung tunai, namun hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki kartu keluarga dan KTP, bahkan banyak masyarakat yang menggunakan satu KTP yang di gunakan untuk beberapa orang sehingga terjadi permasalahan data ganda, hal tersebut tentu saja menjadi masalah, karena data yang tidak valid dan tidak bisa di gunakan.

3.2.2 Fasilitas Kurang Memadai

Mengenai fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya masih kurang memadai, disebabkan masih ada beberapa armada yang rusak dan belum ada perbaikan sampai saat ini . Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sampai saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi guna mengefektifkan pemberian bantuan Covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya . Namun, hal tersebut menghambat para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya .

3.2.3 Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang diberikan merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat menengah kebawah yang terdaftar secara resmi sebagai warga negara Indonesia dan merupakan masyarakat yang terdampak bencana Covid-19, namun banyak masyarakat yang mengira bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada

seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga banyak masyarakat yang komplain karena merasa tidak mendapatkan bantuan tersebut .

Masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 harus memiliki masing-masing kartu keluarga dan KTP . Namun, banyak masyarakat yang belum begitu paham sehingga masyarakat yang tidak memiliki KTP dan kartu keluarga namun ingin mendapatkan BLT tersebut akhirnya menumpang menggunakan KTP dan kartu keluarga orang lain sehingga terjadinya data ganda .

Calon penerima bantuan merupakan masyarakat yang terdaftar secara resmi dan memiliki nomor induk yang valid dan termasuk di dalam kategori yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya .

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kabupaten Jayawijaya

3.3.1 Dinas Sosial Mendata Ulang Nama Warga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai Covid-19 oleh pemerintah memerlukan data yang valid dan benar, karena calon penerima bantuan langsung tunai Covid-19 harus benar-benar sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia secara resmi, namun banyak masyarakat yang belum terdaftar bahkan memiliki nomor induk dan KTP yang tidak terdaftar, oleh sebab itu dalam membantu masyarakat penerima bantuan mendapatkan haknya Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sebagai jembatan pemberian bantuan bagi masyarakat melakukan pendataan ulang masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya .

Mengacu pada teori Soekanto tentang hak dan kewajiban, dalam hal hak dan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jembatan membantu masyarakat penerima bantuan mendapatkan haknya .

3.3.2 Memperbaiki Dan Memperbaharui Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan, pelaksanaan pemberian bantuan di Kabupaten Jayawijaya masih terkendala fasilitas yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melakukan beberapa upaya seperti memperbaiki kendaraan yang ada dan mengajukan penambahan armada .

Berdasarkan teori hak yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa hak merupakan segala sesuatu yang dapat diperoleh setelah selesai melakukan suatu kewajiban . Maka Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melakukan pengajuan kepada pemerintah dalam rangka pembaharuan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan . Fasilitas yang mengalami kerusakan membuat kegiatan pemberian BLT terhambat .

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya telah melakukan berbagai cara salah satunya yaitu dengan membuat proposal anggaran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Papua dalam hal perbaikan sarana dan prasarana .

3.3.3 Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan pemberian bantuan. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bantuan langsung tunai yang hanya dapat di terima bagi masyarakat yang memiliki identitas resmi merupakan hal yang tidak mudah,

pasalnya masyarakat penerima bantuan merupakan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung sehingga untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia sedikit sulit . Selain itu, banyak masyarakat yang complain dan merasa tidak adil karena tidak bisa menerima bantuan dan menuduh bahwa Dinas Sosial menelan uang mereka . Padahal mereka tidak bisa menerima bantuan langsung tunai Covid-19 karena biodata yang tidak lengkap dan nomor induk yang tidak terdaftar secara resmi .

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program bantuan langsung tunai memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Bantuan langsung tunai juga merupakan salah satu sarana pengembangan diri bagi para pemuda di kabupaten Jayawijaya. Penulis menemukan temuan penting yakni generasi muda berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dan komunitas pemudanya, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Baso Iping bahwa bantuan langsung tunai sangat memiliki peran yang besar dalam mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi.

Layaknya program lainnya, bantuan langsung tunai ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah banyak masyarakat yang menggunakan satu nomor identitas secara bersamaan sehingga pendataan yang dilakukan oleh dinas social terhambat akibat adanya data ganda.

Adanya program ini juga diharapkan secara bertahap dapat membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi di tengah masa pandemic dapat dengan mudah teratasi sehingga mampu memperbaiki perekonomian masyarakat secara tidak langsung.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pemberian bantuan langsung tunai di kabupaten Jayawijaya yakni banyak masyarakat yang tidak memiliki nomor kartu keluarga maupun tanda pengenal namun membutuhkan bantuan sehingga menggunakan nomor kartu keluarga dan tanda pengenal orang lain sehingga data yang diterima oleh dinas social menjadi ganda dan hal tersebut menghambat pemberian bantuan langsung tunai yang akan diberikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab IV mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana Covid-19 melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana Covid-19 melalui bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik . Hak ini dapat dilihat dari beberapa dimensi peran yaitu hak dan kewajiban. Hak terdiri dari a) Ketersediaan anggaran, b) Ketersediaan fasilitas, dan c) Sumber daya manusia. Kewajiban terdiri dari: a) Tupoksi, b) Program, dan c) visi & misi. 2) Faktor penghambat antara lain Kartu keluarga (KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) ganda, fasilitas kurang memadai, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan langsung tunai (BLT). 3) Upaya terdiri dari beberapa solusi atas apa yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana Covid-19 melalui bantuan langsung tunai(BLT) di Kabupaten Jayawijaya, antara lain, melakukan pendataan ulang nama warga penerima bantuan langsung tunai(BLT), melakukan pengajuan anggaran mengenai sarana prasarana, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya identitas yang valid bagi penerima bantuan langsung tunai(BLT) Covid-19.

Adapun saran yang bersifat membangun antara lain , Dalam meningkatkan peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya agar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mana mestinya sehingga dapat membantu masyarakat yang kekurangan informasi dan hadir di kantor sesuai dengan aturan jam kantor yang telah ditentukan sehingga pendataan penerima bantuan langsung tunai dapat berjalan dengan baik. 2) Dalam mengatasi faktor penghambat, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dapat menghimbau dan mengarahkan masyarakat untuk tidak menggunakan satu nomor induk secara bersamaan dan dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 kepada masyarakat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3) Masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 Kabupaten Jayawijaya untuk dapat membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebagai calon penerima bantuan agar tidak ada salah pahaman dan sebaiknya mengurus masing-masing identitas pribadi seperti KTP dan KK.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya nomor induk dan kartu tanda pengenal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program bantuan langsung tunai di Kabupaten Jayawijaya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, para dosen pembimbing dan dosen penguji dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Uber. (2010). *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi suatu pengantar, edisi baru*. Jakarta: rajawali pers.

Sugiyono. (2017) *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*. Bandung: Alfabeta.

Warto. (2010). *Uji coba pola manajemen penanggulangan korban bencana alam pada era otonomi daerah*. Jakarta.

Yusuf, m. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: kencana.

<https://apps.who.int/disasters/repo/7656.pdf>

<https://pustaka.dhammadharma.org/ezone/eka-citta/eka-citta%2027.pdf>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/200000569/pengertian-bencana-dan-jenis-jenisnya>

<https://money.kompas.com/read/2021/05/05/113857126/ri-masih-resesi-pertumbuhan-ekonomi-minus-074-persen-pada-kuartal-i-2021?page=all>

<https://covid19.Papua.go.id/>

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/gng45vab-kemiskinan-di-Jayawijaya-diprediksi-naik-40>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-Jayawijaya-tak-terima-bansos-karena-tidak-miliki-e-KTP.html>